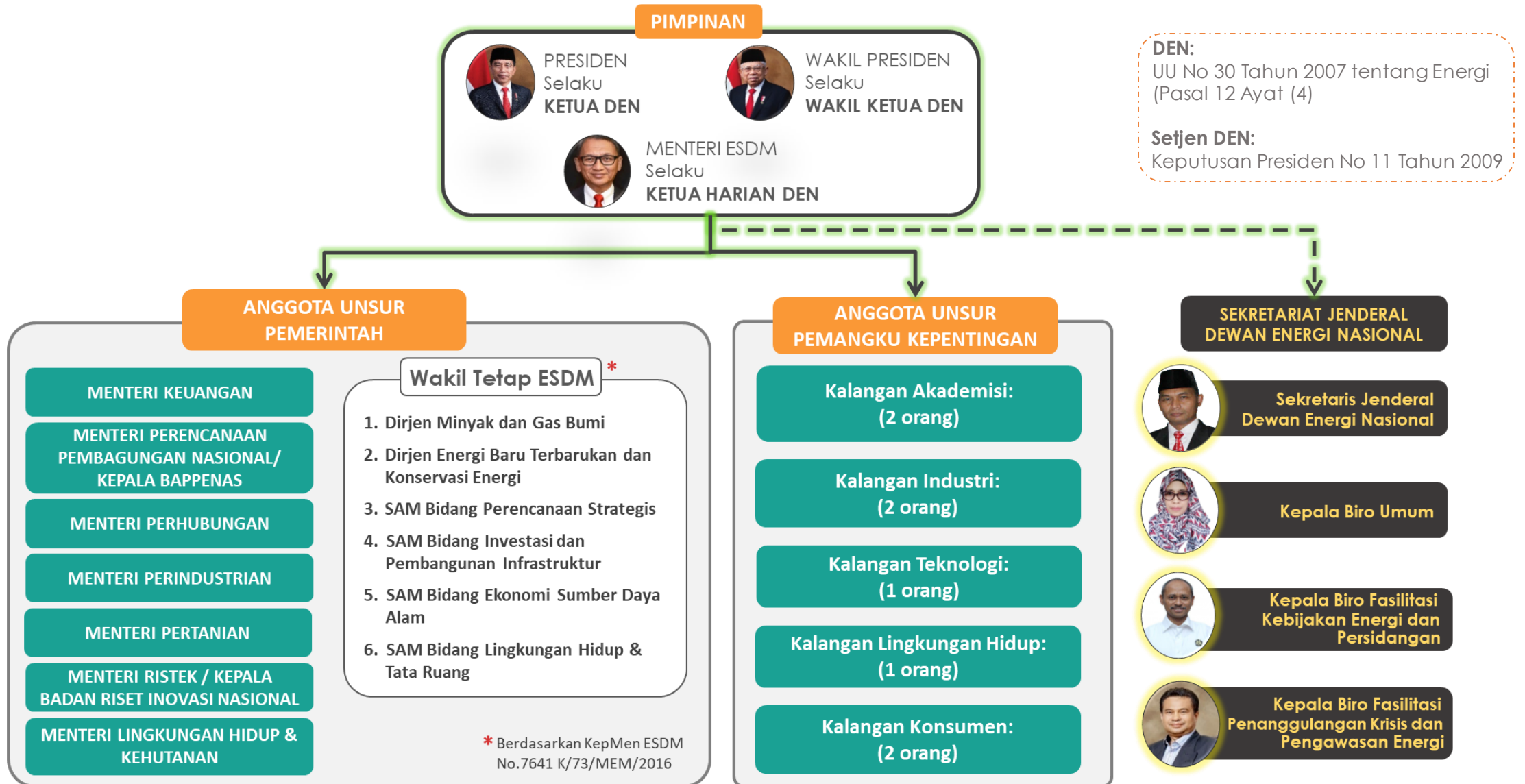


PRESS CONFERENCE

Penyaringan Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan Periode 2020-2025



Jakarta, 13 Maret 2020



Dewan Energi Nasional

Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi

tugas:

1. Merancang dan Merumuskan **Kebijakan Energi Nasional**
2. Menetapkan **Rencana Umum Energi Nasional**
3. Menetapkan **Langkah– Langkah Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi**
4. Mengawasi **Pelaksanaan Kebijakan Bidang Energi Yang Bersifat Lintas Sektor**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi

tugas lainnya:

- 1) Untuk menjamin ketahanan energi nasional, Pemerintah Wajib menyediakan Cadangan Penyangga Energi
- 2) Ketentuan Mengenai **Jenis, Jumlah, Waktu, dan Lokasi Cadangan Penyangga Energi** diatur lebih lanjut oleh **Dewan Energi Nasional**

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Pasal 9 Perpres Nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan DEN dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN

tugas:

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mempunyai Tugas **memberikan Dukungan Teknis dan Administratif kepada Dewan Energi Nasional** serta **fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja**

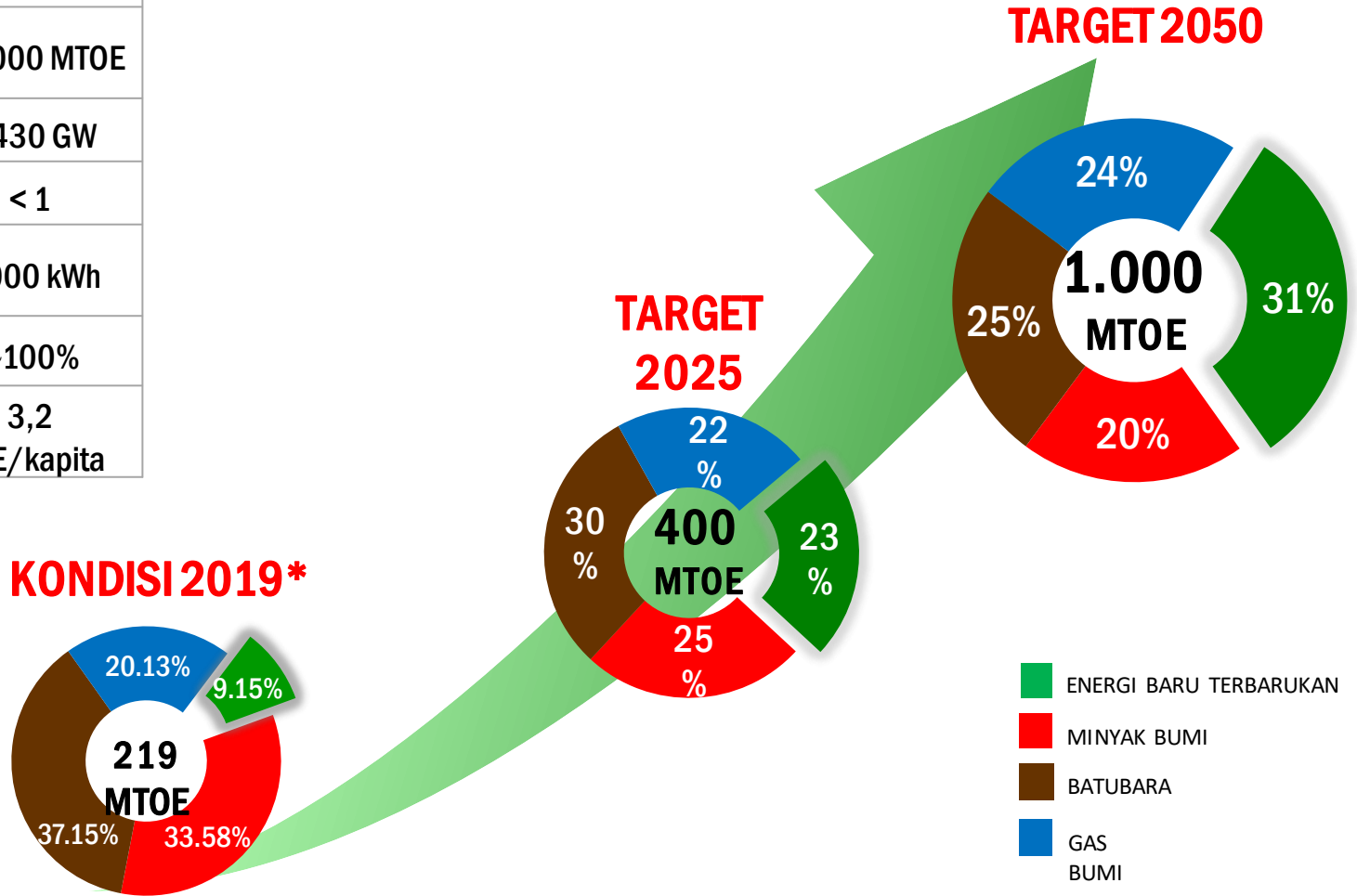
Pasal 3 Permen ESDM 14 tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Dewan Energi Nasional
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional, dan fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja
- c. penyelenggaraan fasilitasi persidangan untuk perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional;
- d. penyelenggaraan fasilitasi untuk penanggulangan krisis energi dan pelaksanaan pengawasan kebijakan energi
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua Harian Dewan Energi Nasional

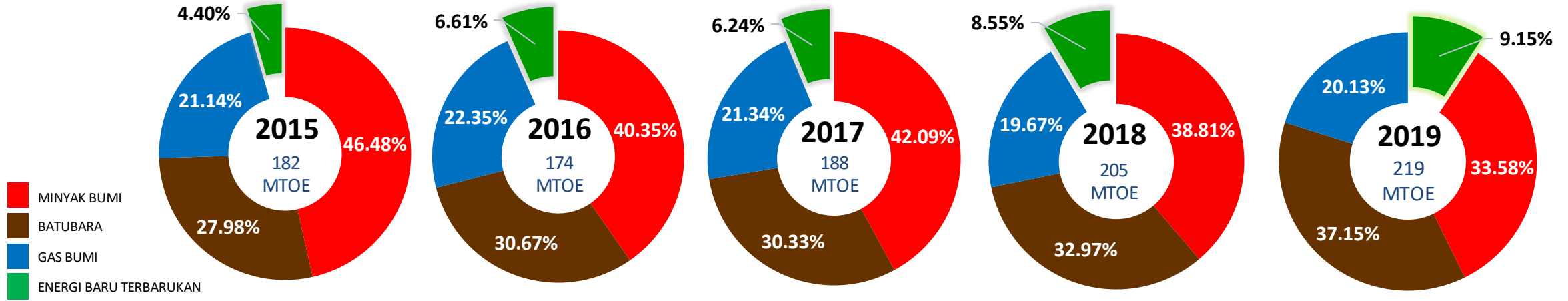
TARGET BAURAN ENERGI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL	2025	2050
Bauran EBT	23%	31%
Penyediaan Energi Primer	> 400 MTOE	> 1.000 MTOE
Kapasitas Pembangkit	> 115 GW	> 430 GW
Elastisitas Energi	< 1	< 1
Konsumsi listrik /kapita/year	2.500 kWh	7.000 kWh
Rasio Elektrifikasi	~100%	~100%
Pemanfaatan Energi Primer	1,4 TOE/kapita	3,2 TOE/kapita



*) Angka sementara

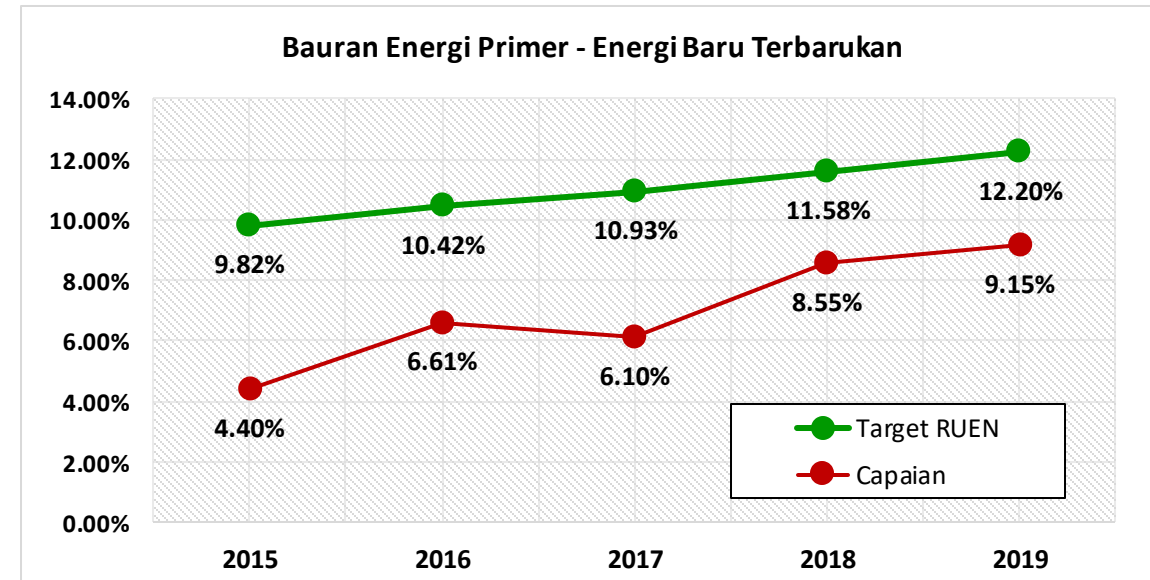
HASIL EVALUASI BAURAN ENERGI PRIMER NASIONAL TAHUN 2015 – 2019



RUEN (Target) & Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2018 (Capaian);

PASOKAN ENERGI PRIMER	2015		2016		2017		2018		2019*		
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
MINYAK BUMI	36,64%	46,48%	34,95%	40,36%	33,30%	42,09%	31,75%	38,81%	30,3%	33,58%	
BATUBARA	32,72%	27,98%	33,62%	30,68%	34,59%	30,33%	35,39%	32,97%	36,4%	37,15%	
GAS BUMI	20,81%	21,14%	21,00%	22,35%	21,17%	21,34%	21,26%	19,67%	21,1%	20,13%	
EBT	9,83%	4,40%	10,43%	6,61%	10,93%	6,24%	11,61%	8,55%	12,3%	9,15%	
TOTAL	MTOE	206,6	182,42	218,6	173,55	233,3	188,11	249,8	205,25	268,4	219,08

*) Angka sementara (5 Februari 2020)



PROGRES PENYUSUNAN PERDA RUED PROVINSI TAHUN 2020

Status per 13 Maret 2020



Perkembangan penyusunan RUED

Provinsi **34 Provinsi** :

- 16** Provinsi telah menetapkan Perda RUED yaitu: Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan.
- 1** Provinsi telah mendapat persetujuan DPRD dan dalam proses fasilitasi dan registrasi di Kemendagri yaitu DI Yogyakarta.
- 12** Provinsi sudah memasukkan dalam Propemperda Tahun 2020 dan sedang melakukan pembahasan dengan DPRD yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara.
- 3** Provinsi sedang menyusun Naskah Akademis dan Ranperda namun belum terdaftar di Program Pembentukan Perda yaitu Sulawesi Utara, Maluku dan Papua Barat.
- 2** Provinsi yang belum memfinalisasi dokumen, Naskah Akademis dan Ranperda yaitu: Sulawesi Tenggara dan Papua.

PROVINSI YANG TELAH MELAKUKAN PENETAPAN RUED

No.	PROVINSI	Draf RUED-P	Naskah Akademik	Ranperda RUED-P	Propemperda, Pembahasan dgn DPRD	Persetujuan DPRD	No Register Kemendagri	Penetapan Perda	Keterangan
1.	Aceh	V	V	V	V	V	V	V	Qanun Nomor 4 Tahun 2019
2.	Sumatera Barat	V	V	V	V	V	V	V	Perda Nomor 11 Tahun 2019
3.	Jambi	V	V	V	V	V	V	V	Perda Nomor 13 Tahun 2019
4.	Kep Bangka Belitung	V	V	V	V	V	V	V	Perda Nomor 13 Tahun 2019
5.	Bengkulu	V	V	V	V	V	V	V	Perda Nomor 7 Tahun 2019
6.	Lampung	V	V	V	V	V	V	V	Perda Nomor 9 Tahun 2019
7.	Jawa Barat	V	V	V	V	V	V	V	Perda Nomor 12 Tahun 2019
8.	Jawa Tengah	V	V	V	V	V	V	V	Perda Nomor 12 Tahun 2018
9.	Jawa Timur	V	V	V	V	V	V	V	Perda Nomor 6 Tahun 2019
10.	Kalimantan Timur	V	V	V	V	V	V	V	Perda 8 Nomor Tahun 2019
11.	Kalimantan Utara	V	V	V	V	V	V	V	Perda No 3 Tahun 2019
12.	Sulawesi Tengah	V	V	V	V	V	V	V	Perda No 10 Tahun 2019
13.	Gorontalo	V	V	V	V	V	V	V	Perda No 7 Tahun 2019
14.	NTB	V	V	V	V	V	V	V	Perda No 8 Tahun 2019
15.	NTT	V	V	V	V	V	V	V	Perda No 10 Tahun 2019
16.	Kalimantan Selatan	V	V	V	V	V	V	V	Perda No 1 Tahun 2020

PROPINSI YANG BELUM MENYELESAIKAN RUED

No.	PROVINSI	Draf RUED-P	Naskah Akademik	Ranperda RUED-P	Propemperda, Pembahasan dgn DPRD	Persetujuan DPRD	No Register Kemendagri	Penetapan Perda	Keterangan
1.	Sumatera Utara	V	V	V	V	-	-	-	Menganggarkan NA dan Ranperda serta masuk Propemperda 2020
2.	Riau	V	V	V	V	-	-	-	Propemperda Tahun 2020
3.	Kepulauan Riau	V	V	V	V	-	-	-	Propemperda Tahun 2020
4.	Sumatera Selatan	V	V	V	V	-	-	-	Pembahasan dengan DPRD
5.	Banten	V	V	V	V	-	-	-	Inisiatif DPRD, Masuk Propemperda 2020
6.	DKI Jakarta	V	V	V	V	-	-	-	Propemperda Tahun 2020
7.	DI Yogyakarta	V	V	V	V	V	-	-	Masuk Propemperda 2019
8.	Bali	V	V	V	V	-	-	-	Masuk Propemperda Tahun 2020
9.	Kalimantan Barat	V	V	V	V	-	-	-	Masuk Propemperda 2020
10.	Kalimantan Tengah	V	V	V	V	-	-	-	Masuk Propemperda 2020
11.	Sulawesi Selatan	V	V	V	V	-	-	-	Propemperda 2020
12.	Sulawesi Barat	V	V	V	V	-	-	-	Masuk Propemperda 2019
13.	Sulawesi Utara	V	-	-	-	-	-	-	Finalisasi Dokumen, NA dan ranperda
14.	Sulawesi Tenggara	V	-	-	-	-	-	-	Finalisasi Dokumen
15.	Maluku	V	-	-	-	-	-	-	Tidak menganggarkan NA dan Ranperda
16.	Maluku Utara	V	V	V	V	-	-	-	Propemperda 2020.
17.	Papua Barat	V	V	V	-	-	-	-	Sedang Menyusun NA dan Ranperda
18.	Papua	V	-	-	-	-	-	-	Finalisasi Dokumen

PERAN DAN MAANFAAT RUED BAGI DAERAH

- ✓ Menjamin ketersediaan energi di daerah hingga tahun 2050,
- ✓ Mendukung rencana pembangunan dan pengembangan daerah, termasuk Kawasan Industri,
- ✓ Sebagai dasar daerah untuk mengajukan anggaran melalui APBN/APBD untuk pengembangan infrastruktur energi daerah terutama EBT,
- ✓ Terbuka potensi pengembangan ekonomi dari pembangunan infrastruktur energi baik hulu maupun hilir, industri pengolahan dan industri lainnya,
- ✓ Memberikan kepastian ketersediaan energi bagi investor untuk melakukan investasi di daerah.

TERIMA KASIH

